

## ALTERNATIF KEBIJAKAN SUBSIDI BBM PASCALIBUR IDUL FITRI TAHUN 2022

13

Lisnawati

### Abstrak

*Libur Idul Fitri Tahun 2022 menyebabkan tingginya animo masyarakat untuk mudik. Banyaknya jumlah kendaraan yang melakukan mobilitas mudik berakibat pada meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini membuat kuota BBM bersubsidi dapat habis sebelum akhir tahun 2022. Tulisan ini bertujuan mengkaji alternatif kebijakan BBM subsidi yang dapat diambil pemerintah agar tidak memperbesar pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2022. Alternatif solusinya adalah dengan menerapkan subsidi langsung kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan dan dengan kriteria kurang mampu (miskin). Oleh karena itu, DPR RI perlu melakukan perhitungan secara tepat, apakah kuota BBM masih mencukupi sampai akhir tahun dengan adanya lonjakan konsumsi akibat libur Idul Fitri 2022. Kebijakan subsidi langsung dapat menjadi alternatif kebijakan agar APBN tidak terbebani dengan subsidi BBM. APBN dapat digunakan untuk pembangunan lainnya yang dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional pada hal-hal yang produktif atau untuk infrastruktur.*

### Pendahuluan

Liburan panjang bersama dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 28 April hingga 6 Mei 2022 meningkatkan arus mudik sejak Ramadhan sampai puncak pada H-2 dan H-1. Lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 2-3 Mei 2022. Demikian pula arus balik yang diperkirakan akan perlahan meningkat mulai H+1 hingga H+7, dengan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 7-8 Mei 2021.

Libur lebaran kali ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat sudah dua tahun tidak melakukan mudik akibat adanya pandemi COVID-19. Animo masyarakat sangat tinggi untuk melakukan mudik tahun ini. Survei mudik lebaran yang dilakukan pegipegi menunjukkan, 80% responden berencana melakukan mudik tahun ini. Hasil survei mencatat bahwa terdapat 10 kota tujuan mudik tahun ini, antara lain Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bandung,



Semarang, Padang, Purwokerto, Palembang, Medan, dan Malang. Berdasarkan moda transportasi yang digunakan, sebanyak 35% responden memilih menggunakan pesawat saat mudik, disusul 35% responden lainnya menggunakan mobil pribadi (databoks.katadata.co.id).

Menurut data dari Jasa Marga, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek yaitu sebanyak 1,7 juta kendaraan mulai H-10 hingga H-1 Lebaran atau 22 April hingga 1 Mei 2022. Angka ini naik 9,5% jika dibandingkan dengan Lebaran 2019 lalu, sebelum pandemi. Dilihat dari sisi distribusi lalu lintas, tujuan yang menjadi favorit pemudik juga masih menuju arah timur via Jalan Tol Trans-Jawa yang memegang 53,8% dari total pemudik, 27,6% menuju arah Merak, dan 18,7% menuju arah Puncak (megapolitan.kompas.com). Pada periode 3-8 Mei 2022, Jasa Marga mencatat terdapat 1,29 juta kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek (ekonomi.bisnis.com).

Banyaknya jumlah kendaraan yang melakukan mobilitas mudik tahun ini tentu sangat besar. Hal ini tentu berakibat pada meningkatnya konsumsi BBM. Posko Mudik yang didirikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat terjadi kenaikan konsumsi BBM sebesar 26% selama arus mudik lebaran. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada arus balik lebaran sebesar 29% (katadata.co.id).

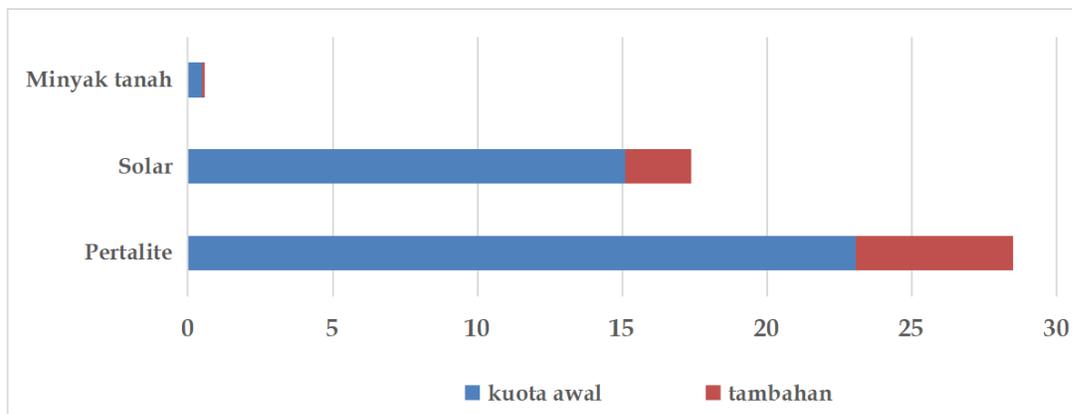
Meningkatnya konsumsi BBM pada saat mudik tentu

menimbulkan pertanyaan, bagaimana kuota BBM bersubsidi sampai akhir tahun 2022? Apakah kuota BBM bersubsidi tahun 2022 akan mencukupi sampai akhir tahun dan bagaimana kemampuan APBN dalam menambah subsidi BBM? Tulisan ini membahas mengenai alternatif kebijakan subsidi BBM pascalibur Idul Fitri 2022.

### **Subsidi BBM dan Kemampuan APBN**

Pada 14 April 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota subsidi BBM untuk pertalite, solar, dan minyak tanah. Kementerian ESDM mengusulkan tambahan kuota pertalite sebesar 5,45 juta kilo liter (kl) dari kuota awal 23,05 juta kl. Ini akan membuat total kuota subsidi menjadi 28,5 juta kl. Lalu, tambahan kuota untuk solar subsidi diusulkan sebesar 2,29 juta kl. Ini akan membuat total kuota naik menjadi 17,39 juta kl dari awalnya 15,1 juta kl. Terakhir, Kementerian ESDM mengusulkan kuota minyak tanah naik 0,1 juta kl dari kuota awal 0,48 juta kl. Ini berarti perubahan kuota menjadi total 0,58 juta kl (databoks.katadata.co.id).

Penambahan kuota ini diakibatkan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh situasi politik global yang penuh ketidakpastian. Situasi politik global telah menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan di mana rata-rata ICP Maret 2022 mencapai USD98,4 per barel.



**Gambar 1. Perkembangan Kuota Subsidi Energi (BBM) Tahun 2022**

Sumber: Kementerian ESDM, 2022.

15

Angka ICP ini jauh di atas asumsi APBN Tahun Anggaran 2022 yang hanya USD63 per barel. Lonjakan harga minyak dunia yang tengah terjadi berpotensi membuat anggaran subsidi energi Indonesia membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Kenaikan ICP ini menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Dampaknya akan menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN.

Dalam APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun, dengan Rp77,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram (kg). Hitungan Kementerian ESDM menyebutkan setiap kenaikan USD1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

Subsidi energi selalu menjadi isu publik yang terjadi setiap tahun. Realisasi subsidi energi selalu lebih tinggi dari target subsidi APBN. Pada 2022, alokasi subsidi

energi sebesar 7,2% terhadap total APBN sebesar Rp1.846 triliun. Dari perspektif ekonomi, secara teknis subsidi pasti akan naik karena dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kenaikan harga energi seperti minyak, gas, batu bara, pelemahan nilai tukar rupiah (kurs), dan peningkatan volume barang maupun orang yang disubsidi (news.detik.com).

Dengan adanya libur Idul Fitri 2022, konsumsi BBM meningkat dari yang diperkirakan. Pemerintah memprediksi akan terdapat kenaikan sebesar 11% namun ternyata kenaikannya mencapai 26% pada arus mudik dan 29% pada arus balik. Bahkan PT Pertamina (Persero) mencatat lonjakan permintaan BBM pada arus mudik lebaran 2022 sebesar 41%. Dengan adanya lonjakan ini, kecukupan kuota BBM sampai akhir tahun 2022 akan menimbulkan pertanyaan.

### **Alternatif Solusi Menekan Subsidi BBM**

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), pemerintah sebaiknya membuat kebijakan baru terkait

subsidi BBM. Kebijakan subsidi langsung (*targeted subsidy*) dapat diterapkan pemerintah guna mengantisipasi kekurangan kuota kembali pada akhir tahun.

Arus mudik dan balik Lebaran 2022 turut mendorong konsumsi BBM, terutama jenis pertalite. Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini terancam melebihi kuota hingga akhir 2022. Menurut BPH Migas, realisasi penyaluran BBM pertalite hingga April 2022 saja sudah 39% dari total kuota yang tersedia tahun ini. Menurut Kementerian ESDM, pertalite sudah terserap 6,48 juta kl dari total kuota 23,05 juta kl hingga 2 April 2022. Sehingga kuota sampai akhir tahun hanya tersisa tinggal 16,57 juta kl. Merujuk angka tersebut, JBKP pertalite terhitung mengalami overkuota sebesar 14% pada periode Januari-Maret 2022. Sedangkan pada libur lebaran tahun 2022 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 36,1%. Bahkan di hari puncak lonjakannya mencapai 46% di atas rata-rata konsumsi normal.

Potensi penggunaan pertalite akan terus meningkat, mengingat disparitas harga antara BBM bersubsidi (penugasan) dengan nonsubsidi (pertamax) kurang lebih Rp5.000 per liter. Demikian juga dengan biosolar dengan dexlite. Kebijakan subsidi BBM sebenarnya dapat diberikan secara langsung. Selama ini subsidi yang diberikan bersifat tidak langsung.

Pengertian subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran berupa dana aktual

kepada individu, kelompok, atau industri tertentu. Sedangkan subsidi tidak langsung adalah subsidi yang tidak memiliki nilai moneter yang telah ditentukan sehingga tidak melibatkan pengeluaran aktual. Kebijakan subsidi tidak langsung mencakup beberapa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi bisa membeli barang tersebut dengan harga di bawah harga pasar.

Opsi subsidi langsung secara teori dapat menjadi solusi terbaik dalam menekan laju konsumsi selain mekanisme harga. Namun demikian terdapat beberapa yang perlu dipersiapkan pemerintah agar kebijakan ini berhasil, yakni: *pertama*, perlu ada kesadaran dari masyarakat dalam menekan konsumsi BBM bersubsidi. Jika masyarakat dapat menekan penggunaan BBM, maka apabila pemerintah menetapkan siapa konsumen yang layak dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi tidak akan menimbulkan gejala di masyarakat ke depan. *Kedua*, menetapkan pihak yang layak diberikan subsidi langsung BBM. Data mengenai masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi harus diverifikasi secara tepat agar efektif di lapangan. *Ketiga*, jika pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi, sebaiknya dilakukan secara gradual agar disparitas harganya tidak terlalu jauh. Disparitas harga yang tinggi cenderung berdampak negatif terhadap konsumsi barang, tidak terkecuali terhadap BBM.

## Penutup

Lonjakan konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi (penugasan) dapat menyebabkan kuota BBM akan habis sebelum akhir tahun 2022. Apabila pemerintah akan menambah kuota untuk BBM bersubsidi, akan mengakibatkan APBN Tahun Anggaran 2022 membengkak. Opsi subsidi langsung dapat menjadi pilihan kebijakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah dapat membuat peraturan mengenai pengaturan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan mendiskusikannya dengan DPR. Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan khususnya implementasi di lapangan perlu dikedepankan.

DPR RI melalui Komisi VII perlu melakukan perhitungan secara tepat, apakah kuota BBM bersubsidi (penugasan) tahun 2022 masih mencukupi dengan adanya lonjakan konsumsi akibat libur Idul Fitri 2022. Apabila terdapat prediksi bahwa kuota tidak akan mencukupi, maka kebijakan subsidi langsung dapat menjadi alternatif kebijakan. Dengan menjalankan kebijakan subsidi langsung, maka APBN Tahun Anggaran 2022 diharapkan memiliki keleluasaan dalam melakukan berbagai manuver pembangunan yang diperlukan. Membebaskan APBN dari jerat subsidi BBM akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional untuk hal-hal yang produktif atau infrastruktur.

## Referensi

"1,2 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Puncak Arus

Mudik Terlewati", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220509/45/1531233/12-juta-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-puncak-arus-mudik-terlewati>, diakses 9 Mei 2022.

"Lebaran 2022 yang Cetak Rekor Jumlah Penumpang dan Kendaraan Terbanyak", <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/09/06520681/mudik-lebaran-2022-yang-cetak-rekor-jumlah-penumpang-dan-kendaraan?page=all>, diakses 10 Mei 2022.

"Konsumsi BBM Melonjak 29% Selama Periode Mudik Lebaran Tahun Ini", <https://katadata.co.id/syahrizalsidik/berita/627bbf7e80707/konsumsi-bbm-melonjak-29-selama-periode-mudik-lebaran-tahun-ini>, diakses 11 Mei 2022.

"Kementerian ESDM Usulkan Tambahan Kuota Peralite, Solar, dan Minyak Tanah", [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kementerian-esdm-usulkan-tambahan-kuota-pertalite-solar-dan-minyak-tanah#:~:text=Usulan%20Tambahan%20Kuota%20BBM%20Bersubsidi%20\(April%202022\)&text=Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya,awal%2023%2C05%20juta%20kiloliter](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kementerian-esdm-usulkan-tambahan-kuota-pertalite-solar-dan-minyak-tanah#:~:text=Usulan%20Tambahan%20Kuota%20BBM%20Bersubsidi%20(April%202022)&text=Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya,awal%2023%2C05%20juta%20kiloliter), diakses 10 Mei 2022.

"Pemerintah-DPR Sepakat Tambah Kouta BBM Subsidi", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-dpr-sepakat-tambah-kouta-bbm-subsidi>, diakses 12 Mei 2022.

"Subsidi BBM untuk Penguatan APBN", <https://news.detik.com/kolom/d-6072354/subsidi-bbm-untuk-penguatan-apbn>, diakses 11 Mei 2022.



Lisnawati  
*lisnawati@dpr.go.id*

---

Lisnawati S.Si., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 ilmu ekonomi universitas indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pembangunan Sektor Perikanan Laut dan Pemberdayaan Nelayan" (2010), "Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2013), dan "Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Memperkuat Perekonomian Nasional" (2015).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*